

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making*. Holt Rinehart and Winston Press. New York.
- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta.
- Asyhadie, Zaebu. 2007. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Hardijan, Rusli. 2001. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Idrus, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Ed. II. Erlangga. Jakarta.
- Khakim, Abdul. 2006. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Payaman J, Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Philipus, M Hadjon. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Pengertian Hukum Adat, Hukum Dalam Masyarakat (Living Law)*. Cv. Angkasa. Bandung.
- _____. 2004. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- _____. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Soekanto, Seorjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, UI- Press. Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Soemitro, Romy Hanityo. 1885. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soepomo, Imam. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. edisi revisi cetakan ke-13. Djambatan. Jakarta.
- Wibowo, Eddi, Mira Subandi & Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. YPAPI. Yogyakarta.
- Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Winardi, Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.

Jurnal dan Publikasi

- Anggi, 2010, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)”. *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Budiyono, 2007, “Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dinamika, 2011, Kajian Perburuhan, *Jurnal Hukum SEDANE Vol.II, No. 1*, 2011, Bogor, Lembaga Informasi Perburuhan SEDANE.
- Hernawan, Ari dan Dewi, Murti Pramawardhani, Pemberangusan Serikat Pekerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Yustitia, Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013*, Yogyakarta.
- Pratiwi, Ayudya Rahma, 2017, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Dalam Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah”, *Tesis*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Setyo Pamungkas, Diskresi Dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur, *Jurnal Refleksi Hukum, Vol.1 No.1 Mei - Agustus 2016*, Yogyakarta.

Sinaga, Ramses H.D, 2007, “Implementasi Kebijakan Upah Minimum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di Sragen”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hdiup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum;

Kamus

Badudu, J.S. dan Zain, Suta Muhamad, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke.3, Balai Pustaka Jakarta.

Marbun, B.N., 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Internet

Achmad, Ady, *PTUN Jakarta Batalkan Pergub UMP DKI Tahun 2017*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a1018dcbb5f/ptun-jakarta-batalkan-pergub-ump-dki-tahun-2017>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

Admin LBH, *Perjuangan Buruh Mencapai Hidup Sejahtera*, <https://lbhyogyakarta.org/2016/05/13/perjuangan-buruh-mencapai-hidup-sejahtera/>, diakses pada tanggal 16 September 2021.

Raharjo, Edzan, “Tuntut Kenaikan Upah, Buruh „Topo Pepe” di Alun-alun Keraton Yogyakarta”, <https://news.detik.com/berita/d-3333371/tuntut-kenaikan-upah-buruh-topo-pepe-di-alun-alun-keraton-yogyakarta>, diakses pada 20 September 2020.

Sucahyo, Nurhadi, “Yogyakarta: Miskin, Tapi Bahagia dan Panjang Usia”, <https://www.voaindonesia.com/a/yogyakarta-miskin-tapi-bahagia-dan-panjang-usia/5195426.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

Syambudi Irwan, “Jerit Buruh Jogja Soal UMP Rp 1,7 Juta: Tak Manusiawi, Jauh dari KHL”, <https://tirto.id/jerit-buruh-jogja-soal-ump-rp17-juta-tak-manusiawi-jauh-dari-khl-ekTW>, diakses pada Rabu 30 Agustus 2020.